

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Jkt.Pst)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



OLEH:

SATYA MARTA RUHIYAT

BP: 1720112059

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. H. ISMANSYAH, SH, MH

Dr. NANI MULYATI, SH, MCL

Program Studi Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019



No. Alumni Universitas:	SATYA MARTA RUHIYAT	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 24 Desember 1993 b) Nama Orang Tua :H. Marjon, SH dan Hj. Ramayenti c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Magister Ilmu Hukum Pidana e) No. BP : 1720112059 f) Tanggal Lulus : g) Lama Studi : Bulan h) Predikat Lulus : i) IPK : j) Alamat : Komp. Pondok Karya Perdana I Blok B-15, RT/RW:01/06, Kel. Batang Kabung, Kec. Koto Tengah, Simpang lalang, Padang.		

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)

(Satya Marta Ruhiyat, 1720112059, Magister Ilmu Hukum Unand, 2019, 187 Halaman)

Komisi Pembimbing : Prof. Dr. H. Ismansyah, S.H., M.H. dan Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.

ABSTRAK

Keadaan saat ini korupsi bukan lagi berbicara tentang orang perorangan tetapi juga telah menjerat ke dalam korporasi. Korporasi di Indonesia saat ini harus terus dipantau sejauhmana telah terjadi keadaan dimana meraup keuntungan bukan lagi dari usahanya tetapi telah merugikan negara khususnya dalam pembangunan infrastruktur negara. Penjatuhan pidana korporasi dalam Putusan Nomor Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst hakim menjatuhkan sanksi pidana bukan hanya kepada terdakwa orang perorangan saja tetapi juga menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi PT. Duta Graha Indah (PT.DGI). Pada tahun 2009-2010 PT. DGI melalui Direktur utamanya pada waktu tersebut melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksanaan pekerjaan (rekanan). Dalam pelaksanaan proyek terdapat banyaknya permintaan fee kepada PT. DGI untuk diserahkan kepada terdakwa M. Nazaruddin yang waktu itu memenangkan PT. DGI dalam lelang proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana dalam rapat DPR RI. Permasalahan dalam menjerat korporasi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menjadi dasar pembuatan putusan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada korporasi PT. DGI. Tesis ini melakukan telaah mengenai teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pengganti untuk melihat pertimbangan hakim serta pemberian sanksi pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Selanjutnya Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim berdasarkan *vicarious criminal liability* atau Pertanggungjawaban pengganti menilai adanya hubungan kerja dimana *mens rea* yang ditarik dalam diri terdakwa yang mengetahui perbuatan korupsi tetapi bersifat pasif dengan *actus reus* yang ditarik dari perbuatan kepala cabang PT. DGI lainnya untuk berkoordinasi dengan pihak lain untuk dan atas nama korporasi yang menimbulkan perbuatan melawan hukum. Hakim menilai kesalahan yang dibebankan kepada korporasi adalah kesalahan yang dilakukan pengurus sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Sanksi pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan putusan hakim menyatakan PT. Duta Graha Indah (PT.DGI) dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana. Karena uang pengganti merupakan pemidanaan yang sangat penting dalam mengusahakan kembalinya keuangan negara.

Kata Kunci : Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Sanksi Pidana Korporasi

Tesis ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal


Abstrak telah disetujui oleh:

Tanda tangan	1.	2.	3.	4.	5.
Nama terang	Prof.Dr.H.Ismansyah, SH, MH.	Dr.Nani Mulyati, SH,MCL.	Dr.Hj.Aria Zurnetti, SH,MHum.	Dr. Yoserwan, SH,MH,LLM.	Dr. Fadillah Sabri, SH,MH.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi: **Dr. Khairani, S.H., M.H.**

Tanda tangan

	No. Alumni Universitas:	SATYA MARTA RUHIYAT	No. Alumni Fakultas:
	a) Place/Date of Birth : Bukittinggi, Dec 24th, 1993 b) Parents Name: H. Marjon, SH dan Hj. Ramayenti c) Faculty : Law d) Specialist : Post Graduate of Criminal Law e) No. BP : 1720112059 f) Date of Passed : g) Long Term : Months h) Predikat Lulus : i) IPK : j) Address: Komp. Pondok Karya Perdana I Blok B-15, RT/RW:01/06, Kel. Batang Kabung, Kec. Koto Tangah, Simpang lalang, Padang.		

CRIMINAL RESPONSIBILITY AND CRIMINAL SANCTIONS FOR CORPORATION IN CRIMINAL ACT OF CORRUPTION

(Analysis of the Decision of the Central Jakarta District Court Number: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)

(Satya Marta Ruhiyat, 1720112059, Post Graduate of Criminal Law, 2019, 187 pages)

Supervisors : Prof. Dr. H. Ismansyah, S.H., M.H. and Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.

ABSTRACT

The current situation of corruption is no longer talking about individuals but has also enticed into the corporation. Corporations in Indonesia now have to be monitored to what extent there has been a situation where making profits is no longer from their business but has harmed the state especially in the construction of state infrastructure. Corporate criminal liability based on Decision Number Number: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Judges impose criminal sanctions not only on individual defendants but also impose criminal sanctions on corporations of PT. Duta Graha Indah (PT.DGI). In 2009-2010 PT. DGI through its main Director at that time made an agreement in the development projects for special infection hospital and tourism at Udayana University in the 2009 and 2010 fiscal years in order to win PT DGI as partners. In implementing the project there are many fee requests to PT. DGI to be submitted to defendant M. Nazaruddin, who at that time won PT. DGI in the auction of the development projects for special infection hospital and tourism at Udayana in the DPR RI meeting. Problems to enticed corporations against cases of corruption committed by corporations are still difficult to implement in Indonesia. And then the judge's consideration in the decision was the basis for making a decision for the judge in imposing criminal penalties on the corporation PT. DGI. This thesis conducts a study of the theory of punishment, the theory of criminal responsibility and the theory of vicarious criminal liability to see judges' consideration and the provision of criminal sanctions in corporate criminal liability. Furthermore, the research method used is normative juridical. From the results of the study, it can be concluded that judges based on vicarious criminal liability assess the existence of a working relationship in which the mens rea drawn in the defendant knows corruption but is passive with actus reus withdrawn from the actions of the head of the PT. Other DGIs to coordinate with other parties for and on behalf of corporations that cause illegal acts. The judge considered the mistakes imposed on the corporation were mistakes made by the management so that the corporation could be held accountable for criminal acts of corruption that had been committed. Criminal sanctions in terms of corporate criminal liability based on the judge's decision stating that PT. Duta Graha Indah (PT.DGI) was given an additional criminal in the form of substitute money due to a criminal act of corruption committed by a corporation as a subject of criminal law. Because substitute money is a very important punishment in seeking the return of state finances

Keyword : Corporation, Corruption, Corporation Criminal Liability, Criminal Sanctions

This Thesis has been maintained in front of the judges team and declared passed on

Abstract has been approved by:

Signature	1.	2.	3.	4.	5.
Full Names	Prof.Dr.H.Ismansyah, SH, MH.	Dr.Nani Mulyati, SH,MCL.	Dr.Hj.Aria Zurnetti, SH,MHum.	Dr. Yoserwan, SH,MH,LLM.	Dr. Fadillah Sabri, SH,MH.

Knowing,

Coordinator of Law Masters : **Dr. Khairani, S.H., M.H.**

Tanda tangan

